PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHDIANA

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	NAHDIANA
	NIP 196908061992012001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : **Nahdiana**
NIP : **196908061992012001**
Jabatan : **Kepala Dinas**
Unit Kerja : **Dinas Pendidikan**

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	e-SAKIP	Definisi: Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung dan didapatkan dari BPS. Metode Perhitungan: $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSta= Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren Sumber Data: BPS	N/A	N/A	N/A	13,07	13,07	Tahun
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	1	Rata-rata Lama Sekolah	e-SAKIP	Definisi: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Metode Perhitungan: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Metode Penghitungan: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Sumber Data: BPS	N/A	N/A	N/A	11,2	11,2	Tahun

3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <=100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <=100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Nomor (8)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Nomor (8)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Nomor (1)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Nomor (1)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Nomor (6)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Nomor (6)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		6	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Nomor (3)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Nomor (3)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		7	Persentase penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi Nomor (37)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi Nomor (37)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase

9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
10	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	e-Kinerja	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di P2KPTK2	N/A	50	N/A	100	100	Persen
11	Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik	e-Kinerja	Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dibagi jumlah seluruh peserta didik PAUD	N/A	N/A	N/A	82	82	Persen
12	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	e-Kinerja	Rerata persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	N/A	N/A	N/A	30	30	Persen
13	Terbentuknya Ekosistem Pendidikan yang berbasis digital dan terintegrasi	1	Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi	e-Kinerja	Jumlah aplikasi bantuan sosial pendidikan yang diintegrasikan	N/A	N/A	N/A	2	2	Aplikasi
14	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri	e-Kinerja	Jumlah lulusan SMK yang diterima didunia kerja dan berwirausaha dibagi jumlah seluruh lulusan SMK dikurang jumlah yang melanjutkan pendidikan	35%	45%	55%	65%	65%	Persen
15	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	10	10	20	Hari
16	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	50	50	Kolaborator
17	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	**Formula Pengukuran :** Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order **Sumber Data :** Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

19	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase **tersusunnya strategi komunikasi** program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase **tersusunnya editorial plan** sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun *editorial plan* lingkup Provinsi. c) Persentase **tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.** d) Persentase **terpublikasikannya materi komunikasi** melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
21	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	**Defenisi :** Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. **Formula Pengukuran:** Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 **Sumber Data :** Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
22	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
SASARAN OPERASIONAL											
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Indeks

27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Jakarta, 6 Februari 2022

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,

Nahdiana
NIP 196908061992012001